IMPLEMENTASI INOVASI DESA DIGITAL DARI KERJASAMA PENTAHHELIX DI DESA SUNGAI PETAI KABUPATEN KAMPAR

Halfina Syuhada¹, Zulfa Harirah²

^{1,2} Fakultas Ilmu Pemerintah, Universitas Riau, Pekanbaru

¹halfinasyuhada6110@student.unri.ac.id, ²zulfaharirahms@lecturer.unri.ac.id

Received: Desember, 2023; Accepted: Januari, 2025

Abstract

Success in innovation can encourage public interest in developing various other types of innovation. Therefore, the role and position of innovation in the public interest is very important to improve the quality of services provided to society. The aim of this research is to provide an explanation and analysis of how effective the literature review method is, with special emphasis on the use of digital village applications in Kampar Regency. The success of this innovation is considered to be an additional driver of enthusiasm for the public interest in managing various innovations. In this context, the role of innovation becomes very significant in improving the quality of services to the community. Pentahelix cooperation, which involves government, society, and economic or private actors, is considered a key factor in developing digital village innovation. Therefore, the aim of this research is to gain an understanding of the implementation of digital village innovation resulting from pentahelix collaboration in Sungai Petai Village, Kampar Regency. This research uses a literature review method. The results show that the digital village application in Sungai Petai Village, Kampar Regency, has been implemented successfully. This application offers various benefits, such as making the process easier and faster and increasing service accuracy.

Keywords: Innovation, Policy, Digital Village, Pentahelix

Abstrak

Keberhasilan dalam inovasi dapat mendorong kepentingan publik untuk mengembangkan berbagai jenis inovasi lainnya. Oleh sebab itu, peran dan posisi inovasi dalam kepentingan publik sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk memberikan penjelasan dan analisis tentang seberapa efektif metode peninjauan literatur, dengan penekanan khusus pada penggunaan aplikasi desa digital di Kabupaten Kampar. Keberhasilan inovasi tersebut dianggap sebagai pendorong semangat tambahan bagi kepentingan publik dalam mengelola berbagai inovasi. Dalam konteks ini, peran inovasi menjadi sangat signifikan untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Kerjasama pentahelix, yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan pelaku ekonomi atau swasta, dianggap sebagai faktor kunci dalam pengembangan inovasi desa digital. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang implementasi inovasi desa digital yang dihasilkan dari kerjasama pentahelix di Desa Sungai Petai, Kabupaten Kampar. Penelitian ini menggunakan metode review literatur. Hasilnya menunjukkan bahwa aplikasi desa digital di Desa Sungai Petai, Kabupaten Kampar, telah dilaksanakan dengan sukses. Aplikasi ini menawarkan berbagai keuntungan, seperti membuat proses lebih mudah dan lebih cepat dan meningkatkan akurasi pelayanan.

Kata Kunci: Inovasi, Kebijakan, Desa Digital, Pentahelix

How to Cite: Syuhada, H. & Harirah, Z. (2025). Implementasi Inovasi Desa Digital Dari Kerjasama Pentahelix Di Desa Sungai Petai Kabupaten Kampar. *Comm-Edu (Community Education Journal)*, 8 (1), 115-122

PENDAHULUAN

Pada zaman sekarang, inovasi menjadi sangat penting. Ini disebabkan karena berhasilnya pihak swasta mengadopsi berbagai inovasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Keberhasilan ini menarik kepentingan publik untuk melakukan lebih banyak inovasi dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan publik. Konsep e-government terkait erat dengan konsep inovasi karena kemajuan dalam kepentingan publik telah menunjukkan bahwa inovasi dan kemajuan dalam TIK tidak dapat dipisahkan (Safeena & Kammani, 2013). Ini sebabnya banyak lembaga pemerintah, termasuk pemerintah desa, berusaha meningkatkan dan menerapkan berbagai inovasi dalam menjalankan tugas administrasi publik.

Pelaksanaan pemerintahan elektronik di Indonesia sangat bervariasi, mulai dari instansi pemerintah pusat hingga tingkat desa/kelurahan (Rokhman, 2011). Keluwesan setiap instansi pemerintah dalam meningkatkan pemerintahan berbasis elektronik menjadi penyebab utama hal ini. Walaupun demikian, kemajuan dalam pelayanan publik berbasis elektronik di Indonesia masih sebagian besar berkonsentrasi pada pembuatan situs web instansi pemerintah. Pada awalnya, setiap lembaga pemerintah bersaing untuk memperbarui situs web mereka sendiri. Namun, pemerintah mulai membuat aplikasi sesuai dengan kemajuan saat ini (Rahman et al., 2014). Ini menunjukkan adanya pergeseran dari pembangunan situs web menjadi aplikasi. Namun, disayangkan bahwa lembaga pemerintah tampaknya kurang memperhatikan penggunaan secara menyeluruh saat mengembangkannya, dan banyak yang hanya menunjukkan semangat pada tahap pembuatan. Artinya, walaupun setiap lembaga pemerintah tampaknya sangat tertarik pada tahap pembuatan, mereka tidak melakukan pembaruan atau pengelolaan informasi yang berkelanjutan (Eprilianto et al., 2019; Sorensen & Torfing, 2012). Di era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang pesat, Pemerintah Indonesia di bawah arahan Presiden Joko Widodo menekankan signifikansi transformasi digital dalam berbagai aspek kehidupan nasional. Fokus utama dalam inisiatif ini melibatkan penerapan pilar-pilar kunci, yaitu pemerintahan digital, masyarakat digital, dan ekonomi digital, terutama di tingkat desa (Digides, 2023). Inovasi digital ini kemudian disebut Sistem Informasi Desa (SID). Peraturan Menkominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Strategi Pengembangan Desa Digital mengatur konsep SID (Peraturan Menteri, 2015), walaupun beberapa Pemdes atau kelurahan telah memperbarui inovasi digital mereka sebelum undang-undang tersebut dibuat. Namun, keberlanjutan kebijakan tersebut secara tidak langsung menghasilkan banyak masalah. Hingga 2015, 2.204 desa atau kelurahan di Indonesia telah memanfaatkan domain desa.id untuk mengembangkan SID (Lailiyah, 2022).

Dengan adanya undang-undang desa digital, inovasi digital di lembaga Pemdes semakin strategis. Salah satu inisiatif terbaru untuk meningkatkan organisasi Pemdes adalah konsep desa digital, atau Sistem Informasi Desa (SID), yang memanfaatkan kemajuan TIK yang semakin pesat. Lihat kemajuan desa digital atau SID yang terus meningkat di Indonesia, semangat Pemdes untuk meningkatkan inovasi digital mendapat respons yang baik. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengembangan Sistem Informasi Desa (SID) (Peraturan Menteri RI, 2015), yang mengatur pengembangan sistem informasi desa, dan Pasal 86 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Peraturan Perundang-undangan, 2014), yang mewajibkan lembaga pemdes untuk membangun desa digital atau SID.

Menurut (Taket & White, 2000), pemerintah dapat mempercepat terobosan digital SID melalui praktik kerjasama antara pemerintah melalui KPDT dengan CRI. Setiap praktik kerja sama pasti akan menyediakan sejumlah aktivitas untuk semua orang yang terlibat. Empat

konsekuensi dari kerja sama dalam pemerintahan kolaboratif Mereka adalah sebagai berikut: a) kebebasan menentukan dan otonomi, di mana orang bekerja sama untuk menyatukan entitas yang awalnya berdiri sendiri; b) unit otonom, di mana unit otonom dalam organisasi bekerja sama sepenuhnya untuk mencapai tujuan bersama; c) hubungan interdependensi, yang mempermudah pemenuhan sumber daya dan pencapaian tujuan bersama; dan d) perpaduan kekuatan, di mana kekuatan dari berbagai sumber bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama (Eprilianto et al., 2019).

Selain itu terdapat tiga hal harus diperhatikan saat menjalankan kerjasama yang efektif. Mereka termasuk: a) kemudahan untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan lembaga secara lebih efisien dan efektif; b) memperkuat hubungan antar lembaga yang terlibat; dan c) meningkatkan organisasi yang terlibat. Oleh sebab itu, tingkat keberhasilan pelaksanaan kerjasama akan bergantung pada orientasi tujuan yang dibuat selama proses kerja sama.

Pemerintah Provinsi Riau memberikan dukungan yang kuat terhadap program desa digital, dengan harapan dapat menyediakan akses internet terbaik bagi masyarakat di pedesaan. Sejalan dengan pernyataan Kementerian Kominfo yang menargetkan seluruh provinsi di Indonesia mencapai konektivitas internet desa pada tahun 2022, Hasrun berharap Provinsi Riau meraih kemerdekaan internet pada tahun yang sama. Upaya ini diarahkan untuk memastikan konektivitas ke berbagai kepentingan. Hasrun memperhatikan bahwa selama pandemi COVID-19, banyak masyarakat Riau, terutama pelajar, menghadapi kendala dalam proses belajar-mengajar akibat kurangnya akses internet yang memadai. Melalui kerjasama dengan Kementerian Kominfo, harapannya adalah Riau dapat menjadi desa digital yang memberikan fasilitas terbaik kepada masyarakat.

Berdasarkan paragraf di atas, penulis mempunyai tujuan untuk mengungkap implementasi inovasi desa digital yang berasal dari kerjasama pentahelix di Desa Sungai Petai Kabupaten Kampar, dengan judul artikel "Implementasi Inovasi Desa Digital dari Kerjasama Pentahelix di Desa Sungai Petai Kabupaten Kampar".

METODE

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan tingkat efektivitas kerja tim dalam menerapkan inovasi digital SID. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan tinjauan literatur dan analisis interaktif. Proses implementasi inovasi digital SID menjadi dasar analisis data. Metode tersebut terstruktur dalam empat tahap, yakni pengumpulan data, pengurangan data, pengiriman data, dan pembuatan kesimpulan. Untuk menambah validitas data, penelitian ini juga menggunakan teknik triangulasi, baik dari segi metode maupun sumber data. Tujuannya adalah untuk memastikan keabsahan data yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Sistem Informasi Desa (SID) adalah salah satu terobosan digital yang telah ditingkatkan dan digunakan di tingkat lembaga Pemdes. Saat ini, terobosan digital SID sudah menjadi standar di seluruh desa, dan kondisi geografis setiap Pemdes tidak lagi menjadi hambatan untuk mempercepat dan menerapkan terobosan digital SID. Dalam proses ini, bagaimanapun, digital SID ditingkatkan dan dilaksanakan melalui skema. Pada tahap pertama, Pemdes dan CRI bekerja sama secara mandiri. Pada tahap kedua, KPDT, CRI, dan seluruh Pemdes bekerja sama secara terpusat. Akibatnya, ada perbedaan yang jelas antara dua fase kerja sama ini. Ada setidaknya tiga perbedaan utama antara tahap pertama dan kedua dari

proses peningkatan dan implementasi terobosan digital SID. Pada tahap pertama, hanya Pemdes dan CRI terlibat; pada tahap kedua, KPDT, CRI, dan seluruh Pemdes terlibat.

Faktor pendorong kerjasama berbeda untuk tahap kedua. Faktor pendorong pada tahap pertama adalah kebutuhan untuk manajemen data desa setelah bencana alam. Faktor pendorong pada tahap kedua adalah kebijakan pemerintah pusat yang mengatur pengembangan dan pelaksanaan pemerintah berbasis elektronik. Pada tahap kedua, KPDT secara khusus didorong oleh kebijakan untuk meningkatkan terobosan digital SID yang digunakan di pemerintah desa. Ketiga, kedua tahap tersebut berbeda dalam hal kerjasama. Setidaknya tiga tahapan kerjasama terlibat dalam tahap identifikasi masalah, pendekatan, dan pembangunan. Tahap ketiga mencakup peningkatan infrastruktur, pendampingan, pemanfaatan terobosan digital SID, dan pengembangan terobosan digital SID. Di sisi lain, tahap kedua kerjasama terdiri dari empat langkah.

Pada langkah pertama, KPDT menemukan program digital SID, langkah kedua melibatkan Pemdes dengan pendekatan KPDT; dan langkah keempat adalah sosialisasi, yang dilakukan secara terpusat dengan pelatihan dan pendampingan untuk setiap pemerintah desa. Kerjasama terjadi selama tahap pengembangan dan implementasi inovasi. Studi literatur menunjukkan bahwa seluruh desa telah mengadopsi terobosan digital SID sejak tahun 2014. Walaupun ini dimulai pada tahun 2014, beberapa Pemdes telah meningkatkan terobosan digital SID pada tahun 2006 dan berhasil menerapkannya sejak 2009. Hasil ini menunjukkan bahwa terobosan digital SID yang ditingkatkan dan diadopsi oleh Pemdes menarik KPDT untuk meningkatkan terobosan digital SID. Menariknya, setiap Pemdes mengalami variasi saat menerapkan inovasi digital. Ini karena sumber daya yang berbeda di setiap desa. Setiap Pemdes mempunyai batasan yang memengaruhi proses menerapkan terobosan digital SID. Namun, implementasi yang efektif dari terobosan digital SID di setiap Pemdes menguntungkan masyarakat desa dan aparat pemerintah desa.

Sederhananya, efektivitas menunjukkan sejauh mana terobosan digital SID dapat membantu aparat Pemdes memberikan pelayanan kepada masyarakat. Efektivitas menguntungkan masyarakat desa dan aparat pemerintah desa. Hal ini sesuai dengan kebijakan Pemdes, yang menyatakan bahwa terobosan digital SID adalah tujuan utama untuk membuat tugas yang dilakukan Pemdes menjadi lebih mudah. Diharapkan bahwa peningkatan dan penerapan terobosan digital SID akan meningkatkan manajemen data dan informasi desa sehingga masyarakat dan pihak lain yang membutuhkannya lebih mudah mendapatkan akses kenya. Oleh sebab itu, diharapkan bahwa tujuan utama kebijakan tersebut dapat dicapai melalui praktik kerjasama yang dilakukan dalam peningkatan dan penerapan terobosan digital SID.

Pemerintah desa sebagai lembaga pemerintahan terkecil, harusnya menjadi lembaga yang paling akrab dan memahami situasi dan kebutuhan masyarakat di wilayahnya. Ini sangat berguna untuk kesuksesan pelaksanaan peningkatan dan penerapan terobosan digital SID. Ini terutama berlaku untuk pemerintah desa, yang merupakan pihak utama yang menyadari kebutuhan akan manajemen data desa yang lebih baik setelah bencana alam. Penggunaan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pengelolaan data desa dapat mengubah sistem manajemen data konvensional menjadi digital SID seperti yang ada saat ini. Keberhasilan dalam melaksanakan peningkatan dan penerapan terobosan digital SID bergantung pada kesadaran akan kebutuhan dan potensi kondisi Pemerintah Desa. Kesekretariatan Pemberdayaan dan Pembangunan Desa Terpadu (KPDT) tertarik untuk mendorong penggunaan terobosan digital SID di seluruh desa. Akibatnya, setiap Pemdes

seharusnya dapat memaksimalkan pemanfaatan terobosan digital SID yang telah dilaksanakan untuk mendukung proses penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan dari langkah ini adalah untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparat desa, sehingga mereka dapat memanfaatkan terobosan digital SID dengan optimal. Sebagai hasilnya, penerapan terobosan digital SID di seluruh Pemerintah Desa (Pemdes) mendukung pengembangan kapasitas dan keterampilan SDM aparat desa. Pelayanan di setiap Pemdes selama ini menghadapi sejumlah masalah, termasuk kompleksitas layanan publik, persyaratan dan prosedur yang rumit, jadwal yang tidak pasti, dan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Kondisi ini telah menyebabkan kurangpercayaan masyarakat terhadap Pemdes, serta penurunan tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa. Oleh karena itu, untuk memastikan inovasi digital SID memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, kontribusi masyarakat memiliki peranan yang sangat penting untuk menjamin keberhasilan pembangunan desa digital (Panda, 2023).

Setidaknya, Dalam proses kerja sama yang dilakukan untuk meningkatkan dan menerapkan terobosan digital SID, terdapat tiga tujuan utama yang ingin dicapai. Tiga tujuan utama SID adalah sebagai berikut: a) harapan bahwa terobosan digital SID dapat membuat manajemen data desa lebih modern dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi; b) harapan bahwa terobosan digital SID dapat meningkatkan layanan yang diberikan kepada masyarakat desa dan meningkatkan citra pelayanan secara keseluruhan; dan c) harapan bahwa terobosan digital SID dapat mengubah cara manajemen data desa menjadi lebih efisien dan lebih. Keberhasilan dalam mencapai tujuan ini dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur seberapa efektif kerja sama dalam peningkatan dan penerapan terobosan digital SID. Selain pencapaian tujuan utama, Selain itu, perubahan yang terjadi dalam masyarakat desa dan antara aparat pemerintah desa dapat menunjukkan kerja sama ini.

Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas kolaborasi dalam peningkatan dan penerapan inovasi digital SID mengacu pada tiga elemen yang telah didefinisikan oleh Gray, sebagaimana dinyatakan oleh Gray dalam studi oleh Sari (2017), Gray menjelaskan bahwa keberhasilan suatu kolaborasi dapat diukur melalui tiga faktor utama: pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi, peningkatan hubungan antara pihak yang terlibat, dan kemajuan organisasi yang terlibat. Faktor-faktor ini mencerminkan perbedaan tujuan di antara organisasi yang terlibat dalam kolaborasi. Secara signifikan, ketiga aspek tersebut dapat terlihat dalam proses peningkatan dan penerapan inovasi digital SID melalui kerjasama antara KPDT, CRI, dan pemerintah desa. Kolaborasi ini memberikan manfaat yang nyata dalam mencapai tujuan dan sasaran inovasi digital SID.

Jika kita melihat penjelasan Gray tentang tiga aspek efektivitas kerjasama, kita dapat menyimpulkan bahwa ketiga aspek tersebut muncul dalam proses kerja sama dalam peningkatan dan penerapan terobosan digital SID. Baik tahap pertama maupun kedua dari proses ini mencerminkan setidaknya tiga elemen efektivitas kerjasama, yaitu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, pengembangan hubungan antar organisasi, dan perkembangan dalam organisasi berhasil dicapai melalui kolaborasi yang bertujuan meningkatkan dan menerapkan inovasi digital SID. Setiap unsur keberhasilan kolaborasi melibatkan enam indikator yang teridentifikasi dari proses kolaborasi dalam usaha meningkatkan dan menerapkan inovasi digital SID.

Beberapa indikator turunan dapat diidentifikasi untuk mencapai tujuan utama kerjasama dalam proses peningkatan dan penerapan terobosan digital SID. Ada dua indikator yang menunjukkan pencapaian tujuan organisasi pertama, yaitu pencapaian tujuan tersebut. Yang pertama adalah kerjasama, yang berdampak pada perubahan manajemen data desa dari metode konvensional, manual, atau tradisional ke metode lebih kontemporer. Selain itu, praktik kerjasama membuat layanan kepada masyarakat desa lebih mudah, murah, dan cepat. Tujuan terakhir adalah dengan adanya kerjasama dalam peningkatan dan pengembangan inovasi digital yang dapat mendukung terwujudnya keterbukaan data dan informasi desa yang dapat diakses dengan efektif dan efisien oleh berbagai pihak. Untuk tujuan kedua, yaitu pengembangan hubungan antar pihak yang terlibat, terdapat dua indikator: adanya kerjasama dalam proses peningkatan dan penerapan terobosan digital SID, yang mendukung pengembangan hubungan dengan pihak yang terlibat. Selain itu, kerja sama membantu pembentukan organisasi masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan desa.

Organisasi yang sudah ada di masyarakat dapat berkembang dan bekerja lebih baik dengan bekerja sama. Peningkatan organisasi adalah tujuan terakhir yang dicapai, yang terdiri dari dua indikator: kerjasama dalam proses peningkatan dan penerapan terobosan digital SID. Kerjasama juga membantu masyarakat desa untuk meningkatkan berbagai potensi yang dimilikinya dengan mendukung pengembangan kapasitas SDM aparat desa agar dapat memanfaatkan terobosan digital SID dengan baik.

Dalam hal mengidentifikasi hasil kerja sama jangka pendek, terdapat tiga indikator yang mencakup dukungan kerjasama untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan aparat desa, Segala proses administrasi konvensional, manual, atau tradisional telah berubah menjadi lebih modern, dan setiap pelaksana harus melakukannya, terutama ketika TIK digunakan dalam terobosan digital SID. Selain itu, efektivitas kerjasama jangka pendek juga mencakup membantu masyarakat memanfaatkan terobosan digital SID. Tujuan terakhir dari efektivitas kerjasama jangka pendek adalah mencapai perbaikan dalam manajemen data desa, yang sebelumnya menggunakan metode manual, tradisional, atau konvensional, dan menjadi lebih modern karena perkembangan teknologi informasi yang semakin maju.

Sementara itu, terdapat beberapa pencapaian dalam hal kerja sama yang efektif dalam jangka panjang untuk meningkatkan dan menerapkan terobosan digital SID di Pemerintah Desa. Pertama, kerjasama membantu meningkatkan kualitas pelayanan. Kedua, memungkinkan kerjasama dengan pihak dan program lainnya. Ketiga, kerjasama memungkinkan integrasi data desa antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, desa, dan kecamatan. Keempat, masyarakat desa dapat memanfaatkan kepentingan pariwisata untuk meningkatkan potensi mereka. Semua pencapaian ini adalah hasil dari kerja sama jangka panjang yang dilakukan oleh Pemdes dalam proses meningkatkan dan menerapkan terobosan digital SID.

Efektivitas kerja sama dalam peningkatan dan penerapan terobosan digital SID baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Efektivitas Jangka Pendek

Pada tahap jangka pendek, efektivitas dapat terlihat selama atau setelah pelaksanaan kolaborasi dalam upaya meningkatkan dan menerapkan inovasi digital SID. Proses kolaborasi ini mencakup beberapa aspek, seperti peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, pencapaian pemberdayaan masyarakat, perbaikan manajemen data desa, dan transformasi Pemerintah Desa sebagai pionir dalam menerapkan inovasi digital SID. Analisis literatur menegaskan bahwa

peran perangkat desa sangat penting dalam kolaborasi ini. Dengan adanya peningkatan dan implementasi SID, perangkat desa perlu beradaptasi dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Oleh karena itu, perangkat desa diharapkan untuk mengikuti berbagai pelatihan dan pendidikan, baik secara formal maupun nonformal, guna memastikan kemampuan mereka dalam menggunakan berbagai perangkat yang mendukung penerapan SID.

b. Efektivitas Jangka Panjang

Berdasarkan penelitian yang ada, terdapat setidaknya empat keuntungan jangka panjang dari proses peningkatan dan penerapan Sistem Informasi Desa (SID). Keuntungan pertama adalah pengembangan layanan publik; kedua adalah dorongan untuk kerjasama lebih lanjut; ketiga adalah integrasi data; dan keempat adalah pertumbuhan kepentingan pariwisata. Salah satu tujuan dari pengembangan dan pelaksanaan SID adalah untuk meningkatkan layanan publik dengan mengubah pendekatan konvensional menjadi digital. Transformasi ini mendukung pengembangan dan pemanfaatan layanan kontemporer kepada masyarakat. Namun, ada masalah dengan integrasi data antara pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten. Untuk mengatasi masalah ini, kerjasama lintas kepentingan diperlukan. Selain itu, implementasi terobosan digital SID memicu kerjasama dengan kepentingan lain, seperti kehadiran Pemdes oleh lembaga swasta dan pemerintah. Terakhir, peningkatan SID diharapkan dapat membantu mengembangkan kepentingan pariwisata dengan memanfaatkan kekayaan budaya, alam, dan kuliner desa. Potensi ini harus ditingkatkan melalui SID secara internal maupun melalui kerjasama dengan kepentingan lain.

Sebagai tanggapan terhadap perkembangan pesat teknologi digital, pemerintah Kabupaten Kampar meluncurkan "Halaman Kampung", aplikasi Desa Digital berbasis web dan Android, di stadion mini di Desa Sungai Petai, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, pada hari Selasa, 6 April 2021 (Harkur, 2021). Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), dipimpin oleh Bupati Kampar H. Catur Sugeng Susanto SH, memulai inisiatif inovatif ini. Aplikasi ini memiliki banyak fitur dan modul yang dapat melakukan berbagai tugas untuk meningkatkan layanan masyarakat. Kepala Desa Sungai Petai, Riyan Adli, mengatakan Desa Digital ini adalah langkah awal yang diharapkan akan mendorong semua desa di Kabupaten Kampar untuk menerapkan konsep Desa Digital. Dia juga menyatakan bahwa Aplikasi ini, yang diuji pada akhir tahun 2020, dapat menyediakan layanan, pengaduan, berita, dan informasi tentang pasar digital dan desa. Ini adalah hasil dari kreativitas remaja Desa Sungai Petai. Diharapkan bahwa program Desa Digital akan memberikan layanan transparan kepada masyarakat

KESIMPULAN

Penggunaan aplikasi desa digital di Desa Sungai Petai, Kabupaten, memiliki potensi untuk memberikan dampak positif pada sektor publik dalam mengelola berbagai inovasi. Oleh karena itu, peran penting inovasi di sektor publik menjadi sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Keberhasilan pengembangan inovasi desa digital tersebut sangat tergantung pada kolaborasi yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku ekonomi atau sektor swasta, yang diimplementasikan melalui pendekatan pentahelix.

DAFTAR PUSTAKA

- Digides. (2023). Mengenal Tiga Pilar Penting Transformasi Digital Desa! DIGIDES. <https://digitaldesa.id/artikel/mengenal-tiga-pilar-penting-transformasi-digital-desa#:~:text=Melalui kolaborasi antara pemerintah%2C masyarakat,masa depan yang terang benderang>
- Eprilianto, D. F., Pradana, G. W., & Sari, Y. E. K. (2019). Digital Inovasi Sektor Publik : Efektivitas Kolaborasi Dalam Implementasi Inovasi Desa Digital. *Jurnal EL-RIYASAH*, 10(2), 127. <https://doi.org/10.24014/jel.v10i2.8909>
- Harkur. (2021). Pertama di Sumatera, Bupati Kampar Launching Aplikasi Desa Digital. *Kominfo Kabupaten Kampar*. <https://kominfosandi.kamparkab.go.id/amp/2021/04/06/pertama-di-sumatera-bupati-kampar-launching-aplikasi-desa-digital/>
- Lailiyah, K. (2022). Digitalisasi Desa Sebagai Upaya Percepatan Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Good Governance. *RISTEK : Jurnal Riset, Inovasi Dan Teknologi Kabupaten Batang*, 6(2), 26–34. <https://doi.org/10.55686/ristek.v6i2.112>
- Panda. (2023). Desa Digital Indonesia: Meningkatkan Kesejahteraan melalui Kolaborasi Pemerintah dan Swasta. Panda. <https://www.panda.id/desa-digital-indonesia-meningkatkan-kesejahteraan-melalui-kolaborasi-pemerintah-dan-swasta/>
- Peraturan Menteri. (2015). Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Strategi Pengembangan Desa Digital.
- Peraturan Menteri RI. (2015). Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengembangan Sistem Informasi Desa (SID).
- Peraturan Perundang-undangan. (2014). Pasal 86 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Rahman, S., Rashid, N., Yadlapalli, A., & Yiqun, L. (2014). Determining Factors of E-Government Implementation: a Multi-criteria Decision-Making Approach. *Pacific Asia Conference on Information Systems*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:18507444>
- Rokhman, A. (2011). E-Government Adoption in Developing Countries; the Case of Indonesia. *Journal of Emerging Trends in Computing and Information Sciences*, 2(5), 228–236.
- Safeena, R., & Kammani, D. A. (2013). Conceptualization of Electronic Government Adoption. *International Journal of Managing Information Technology*, 5, 13–22. <https://doi.org/10.5121/ijmit.2013.5102>
- Sorensen, E., & Torfing, J. (2012). Collaborative innovation in the public sector: the argument. *The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal*, 17(1), 1–11. <https://doi.org/10.1080/14719037.2018.1430248>
- Taket, A., & White, L. (2000). Partnership and Partisipation : Decision Making in the Multiagency Setting. In *International Journal of Public Administration*. Wiley.